

## B A B I

## P E N D A H U L U A N

## A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kepercayaan yang berbeda dengan agama-agama lainnya. Karena Islam bukanlah agama yang mengatur masalah ritual saja, melainkan sebuah sistem yang didalamnya memuat seperangkat nilai yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik di bidang ritual itu sendiri juga di bidang kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian serta bidang-bidang lainnya. Sehingga Islam adalah sistem kepercayaan yang menyeluruh ( Syamil ) dan sempurna ( Khamil ) sistem yang menyeluruh inilah yang mengharuskan ummat Islam membangun dirinya serta menunjukkan identitas dirinya dengan sendi-sendi Islam dalam suatu negara pemerintahan.

Salah satu diantara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, serta menjamin dan melindungi rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah tertentu. Dengan demikian keberadaan suatu pemerintahan dalam suatu negara bersifat mutlak adanya.

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan penuh dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkemba-

ngan suatu negara. Disinilah power Islam kembali diuji dalam kontribusinya mewarnai pertumbuhan dan perkembangan suatu pemerintahan, lebih-lebih pemerintahan yang menaungi seluruh rakyatnya yang mayoritas muslim. Mengingat fungsi dan peranannya yang demikian besar, maka timbullah beberapa pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang ideal, yang menjamin tercapainya tujuan suatu negara.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Islam juga mengatur masalah politik, maka dalam politik Islam dikenal dengan sistem kekhilafahan. Dan sistem kekhilafahan ini telah berlangsung setelah wafatnya rasulullah SAW, sampai dihapuskannya sistem ini oleh dewan nasional Turki tahun 1924. Jadi selama itu umat Islam hanya mengenal negara dengan memakai sistem kekhilafahan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah.

Konsep kedaulatan pemerintahan dalam Islam sepenuhnya merupakan kekuasaan absolut Tuhan. Dan ini yang menjadi prinsip dasar bagi kedaulatan pemerintahan Islam. Dan semua ahli hukum muslim sepakat bahwa kedaulatan hukum adalah hak istimewa Allah semata. (Abul A'la Maududi, 1990: 92). Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an ;

الماله الخلق والأمر ط

".....Ingatlah ! menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah". (Al-Qur'an, 7:54)

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ط

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin - pemimpin selain-Nya". (Al-Qur'an, 7:3)

Adapun prinsip lainnya dari sebuah pemerintahan Islam bahwa ia juga harus mengakui sunnah Rasul yang menjadi tradisi pemerintahan dimasa kerasulan sebagai sumber hukum dalam menjalankan roda pemerintahan yang memuat pasal khusus, baik eksekutif maupun legislatif atau yudikatif tidak dapat mengeluarkan perintah atau memberlakukan hukum atau mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan As-Sunnah. (Abul A'la Maududi, 1990:93) Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu". (Al-Qur'an, 4:59)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal - amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa". (Al-Qur'an, 24:55)

Dasar pemerintahan inilah yang memberikan deskripsi mengenai elit politik kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan Allah sebagai suatu kekuasaan

absolut yang akan memberikan suatu keteraturan kekuasaan, sebagaimana yang dicontohkan Rasul pada saat Allah memberikan perintah dan larangan secara langsung melalui bimbingan wahyu. Setelah wafatnya Rasulullah inilah banyak model pemerintahan yang dikembangkan oleh para sahabat dalam melanjutkan kekuasaan otoritas Rasul.

Dalam memilih model pemerintahan inilah umat Islam sering terperosok ke dalam sekularisasi sebagai akibat dari westernisasi, dan bahkan menjadikan barat sebagai suatu model pemerintahan moderen. Seperti kasus sekularisasi di Turki yang menjiplak barat secara radikal. Akibatnya sistem khilafah yang sudah mapan sebagai suatu model pemerintahan Islam menjadi tumbang.

Proses sekularisasi juga sering terjadi dimana-mana diberbagai sisi kehidupan seiring dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses sekularisasi ini menjadi suatu bentuk yang mengkristal pada abad ke 17-18 pada zaman Renaissance, yang mana pada periode ini Mohammad Al-Bahy menyebutnya sebagai periode sekularisme moderat yang di anut oleh negara-negara Eropa barat dan Amerika Serikat serta negara-negara dunia ketiga.

Sedangkan periode selanjutnya yang telah mencapai puncak ke ekstrimannya adalah pada abad ke 19 dan Mohammad Al-Bahy menyebutnya sebagai periode sekularisme ekstrim yang banyak di anut oleh negara-negara Eropa timur dan Rusia. Dalam periode ini agama telah sama sekali dilenyapkan dari

kehidupan masyarakat, dan akal telah menjadi tolak ukur dalam menemukan agama baru.

Sekularisasi ini telah merupakan sebuah studi, yang mana dampaknya telah merembes kenegara-negara Islam dan bahkan telah menjadi suatu pemikiran tanpa mengikuti kemajuan-kemajuan yang diperoleh negara-negara barat negara-negara Islam tidak akan maju. Pandangan yang sempit inilah yang membuat negara-negara Islam berlomba-lomba mengadakan pembaharuan.

Melihat dari patokan sejarah, seolah umat Islam tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya selama ini. Lebih-lebih setelah terdapat ketimpangan-ketimpangan antara timur dan barat, yang mana masyarakat timur (negara-negara Islam) cenderung di asumsikan sebagai suatu negara yang hanya mengurus masalah-masalah ritual saja. Sehingga kesenjangan di bidang matriel tampak kentara dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh negara-negara barat dalam bidang matriel dan rapuh di bidang spirituil. Hal inilah yang banyak menimbulkan polemik di kalangan intelektual muslim dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan, dan dalam mengejar ketertinggalannya dengan dunia barat. Sehingga mau tidak mau umat Islam melakukan modernisasi di berbagai bidang. Dalam melakukan modernisasi inilah tanpa mereka sadari terbentuklah suatu masyarakat yang komunal bebas, dan bahkan cenderung melepaskan konsep kedaulatan pemerintahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul.

Setiap usaha ke arah modernisasi hampir bisa dipastikan akan mengalami deferensiasi dalam struktur politik dan pemerintahan serta akan mengalami perubahan nilai-nilai ke arah ekualitas (persamaan hak) diantara para warga masyarakat dalam hal partisipasi politik dan kesempatan ekonomi serta mengalami peningkatan kapasitas untuk menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi. (M Amien Rais, 1987:123). Hal inilah yang memicu para intelektual muslim untuk melakukan perubahan-perubahan dan alternatif-alternatif dalam mengatasi keterbelakangan yang terjadi di dunia muslim. Umumnya alternatif yang diterapkan diantaranya adalah sekularisasi diberbagai bidang, utamanya dibidang politik sebagaimana kemajuan-kemajuan yang diperoleh Orang orang barat dibidang matriel.

Dalam pemikiran kita sekularisasi selalu diartikan pemisahan negara dari agama, sedang arti sebenarnya adalah lebih luas. Pada dasarnya istilah negara sekuler adalah suatu negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan negara, agama telah diasingkan dari kehidupan negara dalam berbagai sektornya. (Muh Tohir Aashari, 1992:114) Dengan demikian yang menjadi sekuler bukan hanya agama, melainkan juga pranata-pranata sosial lainnya, seperti pendidikan sekuler, hukum sekuler, ekonomi sekuler, politik sekuler dan lain sebagainya. Bahkan apabila masyarakat telah melepaskan diri dari ikatan agama maka mereka pun disebut masyarakat sekuler.

Proses pelepasan diri dari ikatan agama disebut sekularisasi, dan proses ini bukan hanya terdapat pada masyarakat barat melainkan juga terdapat pada masyarakat muslim. Dengan pengertian bahwa sekularisasi di dunia barat membawa orang melepaskan diri dari ikatan agama secara total dan agama dianggap sebagai penghalang kemajuan pembangunan, sehingga orang disana cenderung tidak beragama lagi (Sekularisme Ekstrim). Sedangkan di dunia muslim, proses sekularisasi tersebut hanya pada ikatan-ikatan pemerintahan, sedang agama menjadi urusan pribadi yang terkait erat dengan rohani manusia dan orang masih tetap dalam keadaan beragama (Sekularisme Moderat).

Penerapan konsep negara sekuler dalam dunia muslim telah mengakibatkan pluralisme politik dikalangan mereka. Sehingga konsep negara syari'ah yang ditawarkan Islam menjadi mandul dan bahkan tidak berfungsi sama sekali. Hal ini dikarenakan konsep negara sekuler yang ditawarkan telah memporak-porandakan kehidupan muslim dalam berbangsa dan bernegara. Itulah mengapa sebabnya setiap usaha kearah modernisasi selalu menjadi perhatian masyarakat intelektual muslim, apakah modernisasi yang diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat atau malah menghancurkan asimilisi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan pada sisi lain adanya sekularisasi pada masyarakat muslim dewasa ini tidak dapat dihindari, sebab usaha kearah modernisasi selalu memakan korban, yang ma-

na pihak yang dilemahkan itulah yang selalu menjadi korban. Sehingga untuk mewujudkan konsep negara syaria'ah yang diharapkan keberadaannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sangat sulit diterapkan.

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh modernisasi terhadap ideologi suatu negara, terutama negara Islam yang kena pengaruh kultur barat dengan menerapkan konsep sekuler dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep sekuler ini tampak akarnya telah menjalar kemana-mana hingga menengkrak kuat di berbagai sisi dan seginya. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan atas kemajuan-kemajuan yang diperoleh orang-orang barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengetahui kajian lebih lanjut maka diperlukan pembahasan yang mendalam terhadap konsep negara sekuler ini. Dan penelitian masalah ini diharapkan kegunaannya dalam penelitian selanjutnya, setelah dalam penelitian tidak dijumpai hasil penelitian secara khusus tentang masalah ini.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas maka masalah pokok yang hendak dipelajari adalah konsep negara sekuler dalam kaitannya dengan konsep negara sekuler ekstrim dan konsep negara sekuler moderat yang dianalisis menurut hukum Islam.

### C. Pembatasan Masalah.

Masalah konsep sebuah negara adalah konsep yang sangat umum dan sangat luas yang mencakup seluruh negara-negara yang ada. Untuk itu masalah konsep negara sekuler kami batasi pada negara-negara yang terkena imbas sekularisasi yang pengaruhnya terasa langsung pada ideologi suatu negara terutama negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Jadi masalah yang kami angkat menjadi : Konsep negara sekuler di negara-negara yang melaksanakan sekularisasi.

Dengan pembatasan masalah tersebut di atas maka masalahnya menjadi : Konsep negara sekuler yang dianalisis menurut hukum Islam.

### D. Rumusan Masalah.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas maka rumusan masalahnya di buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana deskripsi tentang sistem konsep negara sekuler.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep negara sekuler .

### E. Tujuan Studi

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan tentang negara sekuler dalam kaitannya dengan konsep negara sekuler itu sendiri.
2. Mengetahui secara jelas apakah konsep negara sekuler tersebut sesuai dengan hukum (negara syari'ah) Islam atau tidak.

### F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian untuk :

1. Sebagai bahan kajian dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
2. Sebagai acuan atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, bagi yang berminat dalam masalah ini.
3. Sebagai sarana transformasi penyampaian karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

### G. Pelaksanaan Penelitian

#### 1. Data-data yang dihimpun

Adapun data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah :

- Konsep negara sekuler dan sebab-sebab yang menyebabkannya.

- Bentuk-bentuk sekularisasi masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- Agama dan kehidupan beragama di negara-negara yang melaksanakan sekularisasi.
- Pendapat para Intelektual muslim mengenai konsep negara sekuler.
- Sekularisasi di negara-negara Islam moderen.

## 2. Sumber Data

Data-data yang dihimpun tersebut antara lain dari kepustakaan :

- Abdullah Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah.
- Salim Azzam, Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam.
- Donal Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik.
- Peter E. Glasner, Sosiologi Sekularisasi.
- Pardoyo, Sekularisasi dalam Polemik.
- Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme.

## 3. Tehnik Penggalan Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka (Library Research)

Adapun tehnik penggalan data tersebut dengan cara menggali dokumen-dokumen yang ada dengan menelaah dan menganalisis masalah-masalah yang dulu muncul

dan masalah-masalah yang berkembang sekarang.

Kemudian dari telaah dan analisis sumber-sumber itu hasilnya di catat dan dikwalifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### 4. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut dianalisis dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- Editing ; yaitu menghimpun, memeriksa dan memilah data-data yang di peroleh dari sumber pustaka.
- Pengorganisasian data ; menyusun dan mensistematisasi kan data-data yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah.
- Penemuan hasil ; analisis terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori atau dalil, sehingga diperoleh simpulan dari perumusan masalah tersebut.

#### 5. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Mengingat analisis data sefara kualitatif, maka metode pembahasan hasil penelitian ini ditempuh dengan cara :

- Deduktif ; yaitu diawali dengan mengemukakan teori teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat

umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

- Verifikatif ; yaitu pengumpulan data empiris dengan pengujian satu hipotesa yang dipakai untuk menilai hasil penerangan (data yang dihimpun) atau pemecahan suatu masalah dengan dua hal : Norma-norma hukum dan kenyataan (hasil-hasil) sehingga dapat dirumuskan simpulannya.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari apa yang ada dalam skripsi ini maka sistematikanya di bagi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab ini di-inventarisir secara global sebagai berikut :

##### BAB. I Yaitu Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran mengenai proses mencari kebenaran yang berkaitan dengan studi ini yaitu "Apa ?" yang meliputi permasalahan dan tujuan studi, "Bagaimana ?" yang meliputi metode, pengumpulan dan analisis data, "Untuk apa ?" yang meliputi kegunaan studi.

##### BAB. II Yaitu Landasan Teori

Bab ini berisi tentang awal pembahasan yakni tinjauan umum tentang teori-teori yang seharusnya akan digunakan untuk pembahasan Obyek

penelitian, meliputi :

- a. Pengertian negara Islam
- b. Tinjauan umum tentang bentuk pemerintahan negara Islam dalam historis pembentukan konsep negara syaria'ah dengan mengemukakan prinsip-prinsip dasarnya serta tujuannya.

### BAB. III Yaitu Data yang dihimpun

Bab ini berisi mengenai data tentang objek pembahasan, yang man objek pembahasan ini digali semaksimal mungkin yang menjadi kupasan dalam kajian metode pembahasan ini, yang meliputi :

- a. Penerapan konsep negara sekuler yang mencakup; pengertian, sejarah timbulnya, bentuk bentuk, sebab-sebab, sistem pemerintahan negara sekuler dan negara-negara yang melaksanakan sekularisasi.
- b. Dampak sekularisasi terhadap agama, berikut ambivalensi negara sekuler terutama di negara-negara Islam yang melakukan modernisasi.

### BAB. IV Yaitu Analisa

Bab ini merupakan penyajian data sekaligus analisa data yang ada yaitu mengenai konsep negara sekuler dalam kaitannya dengan verifikasi data (data yang dihimpun)

**BAB. V Kesimpulan**

Yaitu jawaban sebagai hasil akhir yang di tarik dari pembahasan dalam bab IV yang menjadi jawaban permasalahan.

